

**ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PUBLIK
DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada pembimbing tugas akhir program studi Diploma III Akuntansi
sebagai salah satu persyaratan Guna memperoleh gelar Ahli Madya*



Oleh :

AGUSTIA UTARI

NIM 1109161

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


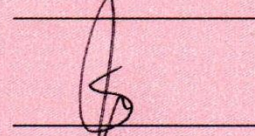
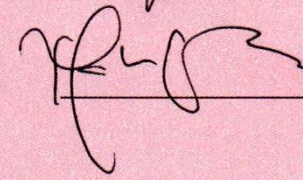
**ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PUBLIK DI
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG**

Nama : Agustia Utari
NIM : 1109161
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, Februari 2015

Tim Penguji,

- | Nama | Tanda Tangan |
|--|---|
| 1. Ketua : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak |  |
| 2. Anggota : Salma Taqwa, SE, Msi |  |
| 3. Anggota : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak |  |

ABSTRAK

Agustia Utari (1109161/2011) : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik Di Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN) Padang

Pembimbing : Fefri Indra Arza SE, M. Sc, Ak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana akuntabilitas kinerja dan bagaimana akuntabilitas keuangan di KPPN.

Bentuk penelitian tugas akhir ini dikategorikan adalah deskriptif. Penulis melakukan deskriptif tentang akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pada LAKIP di KPPN Padang. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengelolaan data sehingga akhirnya diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang LAKIP di KPPN Padang .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja dalam LAKIP di KPPN Padang sudah melaksanakan target akuntabilitas kinerja dengan baik.. Secara umum KPPN Padang telah melaksanakan target akuntabilitas kinerja yang dibebankan dan telah terealisasi dengan baik. Namun masih ada kinerja yang belum bisa tercapai dengan baik yaitu mengenai pelayanan prima dan kepatuhan pengguna layanan tinggi. Hal ini terjadi karena masih kurangnya fasilitas pelayanan dari pihak internal dan ketidak disiplinian pihak eksternal. Pada akuntabilitas keuangan, KPPN Padang telah bekinerja dengan sangat baik yang ditunjukkan dengan persentase kegiatan yang terealisasi dengan Pagu yang telah disediakan yang pencapaiannya hampir mendekati angka yang telah dianggarkan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir yang berjudul **“Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik di Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN) Padang”**. Penulisan tugas akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terealisasinya tugas akhir ini tidak terlepas berkat bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fefri Indra yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi serta Bapak Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Perengki Susanto, selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi dan Ibu Nelvirita, selaku Sekretaris Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi moril dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc,Ak dan selaku penguji yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan tugas akhir ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
5. Staf administrasi program studi DIII Akuntansi, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Pegawai Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan tugas akhir dan memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Perpustakaan Universitas Negeri Padang.
6. Bapak pimpinan beserta staf dan karyawan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang
7. Teristimewa penulis persembahkan kepada Orang tua beserta keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan mensupport serta doa, semangat motivasi moril dan materil demi terealisasinya cita-cita penulis.
8. Teman-teman seangkatan 2011 Program Studi DIII Akuntansi, kakak-kakak dan adik-adik selingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan di ridhoi oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi bahan penulisan maupun kemampuan ilmiah dan teknis penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan yang positif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini serta memberikan arti dan manfaat bagi pembaca.

Padang, Februari 2015

Penulis

Agustia Utari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik	7
B. Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik	9
C. Tujuan Penilaian Kinerja di Instansi Publik	16
D. Manfaat Pengukuran Kinerja Instansi Publik	18
E. Jenis-jenis Akuntabilitas	19

BAB III.PENDEKATAN PENELITIAN	22
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C. Rancangan Penelitian	23
D. Metode Penelitian	24
E. Teknik Analisis Data	25
BAB IV. PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Instansi	27
B. Pembahasan	34
BAB V. PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Akuntabilitas Keuangan	49
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik KPPN Padang Tahun
2013

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah besar sering dihadapi negara yang sedang berkembang adalah mengatur dan mengelola keuangan negara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Masalah kesenjangan pendapatan tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, namun negara maju sekalipun memiliki permasalahan seperti ini.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi pembendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi pembendaharaan tersebut terutama meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah, dan pemanfaatan dana yang menganggur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang selama ini lebih banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah, tidaklah dimaksud untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Namun, pengelolaan keuangan sektor publik dilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatan superioritas, negara telah membuat aparaturnya bergerak dalam kegiatan

pengelolaan keuangan sektor publik, sehingga tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para professional. Maka diperlukan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*good governance*) yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, ditandai dengan adanya transparan, akuntabel, publik, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas, serta penegakan hukum yang sesuai dengan lingkungan pemerintah.

Pengelolaan keuangan dikelola oleh kementerian keuangan yang bertanggung jawab atas segala bentuk penerimaan-penerimaan yang dihasilkan oleh negara, dalam undang-undang pembendaharaan negara ditegaskan bahwa kewenangan kementerian keuangan adalah mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum pada bank sentral, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana pemerintah. Kementerian keuangan selaku Bendahara Umum bertugas menyiapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai langkah kerja untuk penyeimbang dari penerimaan-penerimaan yang diterima serta pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan negara, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat, setiap APBN yang direncanakan oleh pemerintah dan sudah direalisasikan maka selanjutnya dipertanggungjawabkan, bentuk dari pertanggung jawaban tersebut disusun dalam bentuk laporan keuangan/laporan realisasi anggaran, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan

seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama tahun berjalan.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel, maka Bendahara harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan yang dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk pelaporan pertanggungjawaban.

Pengembangan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban instansi pemerintah telah dimulai sejak tahun 1998, dengan diterbitkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sementara itu di sisi lain, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran instansi yang bersangkutan dibuatlah suatu sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang telah diperbarui dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi (LAN & BPKP, 2000: 63).

KPPN Padang selaku organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat Jenderal Pembendaharaan bertugas melaksanakan kewenangan dan menjadi Bendahara Umum diwilayah kerjanya yang menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan targetnya. Pencapaian setiap target kinerja membutuhkan kerja keras dan kerja sama dari seluruh pegawai. Namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala berupa tingkat pemahaman satker atas peraturan perbendaharaan yang masih belum merata serta penyerapan anggaran yang belum optimal dan masih menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Dalam menghadapi kendala tersebut, KPPN Padang mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya antara lain dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para satker terkait peraturan perbendaharaan,

perencanaan kas untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, dan penyusunan laporan bendahara pengeluaran akuntabel.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini sebagai topik untuk pemikiran penulis dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas Kinerja pada LAKIP di KPPN Padang ?
2. Bagaimana Akuntabilitas Keuangan pada LAKIP di KPPN Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja pada LAKIP di KPPN Padang.
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Keuangan pada LAKIP di KPPN Padang

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap pengelolaan keuangan negara yang baik agar tercapainya pembangunan ekonomi yang merata.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kerangka pikir peneliti dan dapat dijadikan referensi untuk para peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis laporan akuntabilitas kinerja instansi publik pada KPPN Padang memperoleh hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum KPPN Padang telah melaksanakan target akuntabilitas kinerja yang dibebankan dan telah terealisasi dengan baik. Namun masih ada kinerja yang belum bisa tercapai dengan baik yaitu mengenai pelayanan prima dan kepatuhan pengguna layanan tinggi. Dalam ketercapaian realisasinya terdapat kendala yang ditemui oleh KPPN Padang yaitu jumlah SP2D yang belum optimal diterbitkan tepat waktu dikarenakan adanya perubahan standar batas waktu penyelesaian SP2D . Selain itu, kendala lain yang muncul adalah ketidakdisiplinan Satker dalam penyampaian LPJ yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dikarenakan lokasi satker yang jauh serta penyampaian informasi yang belum lancar.
2. Pada akuntabilitas keuangan, KPPN Padang telah berkinerja dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan angka persentase realisasi yang mendekati anggaran yang telah ditentukan. Pencapaian realisasi yang sangat baik yaitu realisasi belanja pegawai yang persentasenya paling

tinggi. Selanjutnya realisasi kedua yaitu belanja modal dengan persentase yang tidak jauh dengan persentase pencapaian yang terbaik awal. Dan realisasi terakhir yaitu belanja barang, pada persentase inipun cukup menunjukkan angka yang baik.

B. Saran

Analisis laporan akuntabilitas kinerja instansi publik pada KPPN Padang memperoleh hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab terdahulu dan ditambah dengan kesimpulan maka dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pelayanan prima dalam akuntabilitas kinerja KPPN Padang seharusnya meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal. Menciptakan sarana untuk mempermudah penyelesaian SP2D agar dapat diterbitkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain itu penulis juga menghimbau agar KPPN Padang mengadakan workshop atau seminar kepada satuan kerja dalam menjelaskan tata cara penerbitan SP2D dengan aplikasi yang telah disediakan.
2. Diharapkan KPPN Padang memberikan pengarahan kepada satker agar dapat disiplin dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban atau berkas lainnya yang dilaksanakan Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran atau staff lainnya. Dalam hal ini KPPN Padang agar dapat

menyediakan saran atau prasarana yang dapat mempermudah satker dalam menyampaikan berkas-berkas ke KPPN Padang. Dan untuk satker seharusnya dapat menyadari bahwa pentingnya pengaruh kedisiplinan untuk mewujudkan pelayanan yang baik di KPPN Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, Penerbit STIE YKPN
- Mardiasmo, 2007, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit ANDI
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nordiawan Deddi dan Hertianti Ayuningtyas, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Permendagri No 55 Tahun 2008 TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 meliputi asas kepastian hukum, asas proposionalitas, asas akuntabilitas